

**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA-SKPD)
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Ijin-Nya penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Renja-SKPD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2024 merupakan dokumen rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru Tahun 2024 yang merupakan dasar dalam rangka persiapan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2024 memuat isu-isu strategis yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan di Kota Banjarbaru selama Tahun 2024.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2024 menyajikan Tugas Pokok dan Fungsi, Visi, Misi, Strategi, Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2024.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2024 ini disusun berdasarkan pemikiran yang komprehensif dan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang telah, sedang dan akan dijalankan, sehingga Renja ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru untuk melaksanakan program kerja selama Tahun Anggaran 2024.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2024.

Akhirnya semoga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Tahun Anggaran 2024 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya dalam rangka mewujudkan *Good Governance* serta penyusunan kebijaksanaan, program dan kegiatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan Kota Banjarbaru dimasa yang akan datang.

Banjarbaru, Juni 2023

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan
Perikanan Kota Banjarbaru,



DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Dasar Hukum | 3 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 5 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 6 |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU | |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas | 8 |
| 2.2. Analisis Kinerja Perjalanan Dinas | 40 |
| 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | 43 |
| 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 50 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | |
| 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional | 52 |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah | 54 |
| BAB IV PENUTUP | 75 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib membuat dokumen rencana pembangunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (RENJA-SKPD), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah dan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA SKPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis SKPD.

Dengan demikian RENJA SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP).

Pelaksanaan RENJA SKPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan

Kinerja SKPD.

Penyusunan RENJA Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2024 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, dan penelaahan kebijakan Nasional bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi diformulasikan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan yang memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan dokumen RKPD dan Renja SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan pasal 2 (dua) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lainnya.

Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang Rancangan RKPD dan Renja SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kota Banjarbaru.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru sebagai salah satu SKPD di Kota Banjarbaru memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Visi Misi Kota Banjarbaru Tahun 2021 – 2026.

Tahun 2024 adalah tahun ke empat pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru 2021-2026, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 yang memuat

rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja SKPD adalah ;

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Satuan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman

Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

18. Peraturan Kementerian Dalam egeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3) ;
20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 11);
21. Peraturan Walikota Banjarbaru No. 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 32);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 (Lembar Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 7).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2024 selaras dengan maksud dan tujuan rencana strategis yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

- a) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru;
- b) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru;

- c) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru;

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

- a) Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ;
- b) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada tahun anggaran;
- c) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- d) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang dan Unit Pelayanan Tehnis (UPT) pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) Bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut ;

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II.HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat tentang hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian Renstra perangkat daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas, Program dan Kegiatan.

BAB IV. PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah kaidah pelaksanaan, dan rencana tindaklanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang perubahan Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi dilakukan dengan mengukur realisasi capaian-capaian target perencanaan yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis. Evaluasi terhadap Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal yaitu kebijakan perencanaan program/kegiatan, pelaksanaan rencana program/kegiatan dan hasil rencana program/kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru tahun 2024 juga dipengaruhi oleh dilaksanakannya Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru.

Terdapat 10 (sepuluh) program, terdiri 3 (tiga) program urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan 7 (tujuh) program Urusan Pemerintahan Pilihan, dengan total kegiatan 23 (dua puluh tiga) dan 49 (empat puluh sembilan) sub kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru dalam rangka mewujudkan visi misi pemerintah kota Banjarbaru, dengan rincian sebagai berikut :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah Pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah Pada
SKPD

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Sub kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)

Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal

Sub kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

Sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun

Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

Sub kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha

Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

Sub kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Sub kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

UPT PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Sub Kegiatan Penyediaan prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

Sub kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

Sub kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang

Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil perkebunan

Sub Kegiatan Pengawasan penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura

Kegiatan penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain

Sub kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari daerah Kabupaten /Kota Lain

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian

Sub kegiatan Pengendalian dan pemanfaatan Kawasan Pertanian

Sub Kegiatan pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular

Sub kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Analisis Risiko Penyakit Hewan, Zoonosis, Produk Hewan dan Media pembawa Penyakit Hewan Lainnya

PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

Sub kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

Sub Kegiatan Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani

UPT BALAI PEMBIBITAN TERNAK DAN PUSAT KESEHATAN HEWAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Kegiatan Peningkatan Mutu dan peredaran benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam daerah kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik veteriner

URUSAN PEMERINTAHAN PANGAN

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Merupakan program penunjang urusan semua SKPD

Program Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat

Program Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk mengantisipasi krisis pangan global, penyediaan pangan lokal sumber karbohidrat non beras, menggerakkan ekonomi masyarakat serta mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, aktif dan produktif melalui kecukupan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, dan salah satu upaya untuk mendorong masyarakat agar memvariasikan makanan pokok yang dikonsumsi sehingga tidak terfokus pada satu jenis saja.

Dalam rangka pelaksanaan program sasaran strategis yang di gunakan adalah peningkatan pola konsumsi pangan masyarakat dengan indikator kinerja Skor pola pangan harapan konsumsi, dimana target Tahun 2023 adalah 90,25 dan realisasi 91,70 atau dengan capaian 101,61 %.

Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program tersebut adalah :

Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Sub kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)

Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan pangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal

Sub kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

Sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun

Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

B. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Program Pengawasan Keamanan Pangan bertujuan agar pemerintah dapat memberikan perlindungan kepada rakyat untuk mengkonsumsi pangan yang aman bagi kesehatan dan keselamatan jiwanya, dimana pengawasan ini yang bersumber dari tanaman segar asal tumbuhan

Dalam rangka pelaksanaan program tersebut, sasaran yang digunakan adalah peningkatan pengawasan Keamanan pangan dengan indikator kinerja Persentase PSAT (Pangan Segar asal Tumbuhan) yang aman, dimana Tahun 2023 di targetkan sebesar 70 % dan terealisasi 91,44 % atau dengan capaian 130,63 %.

Dalam rangka mendukung program tersebut, maka dilaksanakan beberapa kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota.

Sub kegiatan Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Program pengelolaan perikanan budidaya ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan serta pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan dengan sasaran meningkatnya jumlah pelaku usaha perikanan terampil, dan tenaga penyuluh perikanan pada sentra perikanan.

Sasaran strategis yang digunakan adalah peningkatan pengelolaan perikanan budidaya dengan indikator Jumlah produksi perikanan budidaya dengan target 399,55 ton dan terealisasi sebesar 449,95 ton atau dengan capaian 112,61 %.

Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan program tersebut di atas adalah :

Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

Sub kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha

Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

B. PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Merupakan salah satu program dan kegiatan prioritas kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka mendukung terwujudnya kedaulatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sasaran yang digunakan adalah Peningkatan Sumberdaya Perikanan dengan indikator kinerja Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dengan target Tahun 2022 sebesar 35,05 ton dan realisasi 101,2 ton atau dengan capaian 288,70 %.

Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program tersebut diatas adalah :

Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

C. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi olahan perikanan juga untuk meningkatkan keterampilan anggota kelompok masyarakat atau kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan, selain itu juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian keluarga.

Sasaran yang digunakan adalah peningkatan produksi olahan hasil perikanan dengan indikator kinerja persentase pertumbuhan produksi olahan hasil perikanan, dimana pada tahun 2022 dengan target 2 % dan realisasi sebesar 2,1% atau dengan capaian 105 %.

Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program tersebut adalah sebagai berikut :

Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

Sub kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Sub kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN BIDANG PERTANIAN

A. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan produksi melalui upaya meningkatkan luas tanam dan indeks pertanaman (IP) pertanian termasuk meningkatkan populasi ternak, karena program ini juga menaungi program dan kegiatan bidang peternakan.

Sasaran strategis yang digunakan dalam rangka pelaksanaan program

tersebut ada 2 (dua) yaitu :

1. Meningkatnya pengembangan sarana pertanian/peternakan dengan indikator kinerja Jumlah produksi tanaman pangan, dimana target tahun 2022 adalah 6.943,81 ton dan realisasi 4.525,98 ton atau dengan capaian 65,1 %
2. Meningkatnya populasi ternak dengan indikator kinerja Jumlah Populasi ternak, dimana target Tahun 2022 adalah sebesar 2.851.000 ekor dan realisasi 2.854.153 ekor atau dengan capaian 101 %.

Dalam rangka mendukung program tersebut, maka dilaksanakan beberapa kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

Sub kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang
Sub Kegiatan pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil perkebunan
Sub Kegiatan Pengawasan penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura

Kegiatan penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain

Sub kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari daerah Kabupaten /Kota Lain

Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil

Kegiatan penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain

Sub kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari daerah Kabupaten /Kota Lain

B. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Merupakan program penunjang utama dan pendukung dalam urusan pertanian khususnya dalam melaksanakan budidaya pertanian. Sasaran yang digunakan dalam rangka pelaksanaan program tersebut adalah Peningkatan penyediaan prasarana pertanian dengan indikator kinerja Persentase prasarana pertanian yang di aplikasikan. Pada Tahun 2023 di targetkan 100% dan realisasi 100 % .

Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian program tersebut adalah :

Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian

Sub kegiatan Pengendalian dan pemanfaatan Kawasan Pertanian
Sub Kegiatan pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B,
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian
Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota

C. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Program ini bertujuan untuk mengendalikan dan penanggulangan penyakit yang menyerang ternak, baik yang zoonosis maupun yang menular ke ternak lain. Penyakit zoonosis itu penyakit yang menyerang hewan dan menularkan ke manusia contohnya flu burung dan Rabies.

Penyakit yang menular dari hewan/ternak yaitu PMK (Penyakit Mulut dan Kuku), Brucellosis, Jembrana dan lain lain. Untuk mencegahnya dilakukan vaksinasi (Rabies, PMK dan lain lain). Selain vaksinasi dilakukan desinfeksi kandang dengan Desinfektan. Apabila sudah tertular penyakit, ternak di obati dan dilakukan sosialisasi ke masyarakat.

Sasaran yang digunakan adalah peningkatan status kesehatan hewan di Kota Banjarbaru, dengan indikator kinerja jumlah Hewan yang tertangani dengan target Tahun 2023 sebesar 250 ekor dan realisasi sebesar 450 ekor atau dengan capaian 180 %.

Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program tersebut adalah sebagai berikut:

Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

Sub kegiatan Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan

D. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Merupakan program yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan sumberdaya penyuluh dan petani yang merupakan salah satu ujung tombak agar produktivitas pangan, pertanian dan perikanan meningkat demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang bergerak di sektor pertanian, pangan dan perikanan.

Sasaran strategis yang digunakan dalam program ini adalah Meningkatnya Kelembagaan Penyuluh dan Petani dengan Indikator Kinerja Persentase Jumlah Poktan Yang Naik Kelas/Score, dimana pada Tahun 2023 di targetkan sebesar 67 % dan realisasi sebesar 68,13 % atau dengan capaian sebesar 101,68%.

Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung dalam pencapaian program tersebut adalah sebagai berikut :

Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

Sub kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

Sub Kegiatan Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani

Tabel 2.1.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kota Banjarbaru

Kegiatan Tahun 2022 Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 | | | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022) | | |
|------|--|---|--|---|---|----------------------|----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja SKPD | Realisasi Renja SKPD | Target Realisasi (%) | Target Renja SKPD | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10= (5+7+9) | 11= (10/4) |
| | Urusan Semua SKPD | | | | | | | | | |
| 01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah | B | | B | | | B | | |
| | | Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi | 100% | | 100% | | | 100% | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----|---|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|--|
| 01. | 2. | 01. | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD | 5 | | 5 | | 5 | | |
| | | | | | Persentase perencanaan penganggaran yang responsif gender | 100% | | 100% | | 100% | | |
| 01. | 2. | 01. | 01 | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 dokumen | | 2 dokumen | | 2 dokumen | | |
| 01. | 2. | 01. | 06 | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3 dokumen | | 3 dokumen | | 3 dokumen | | |
| 01. | 2. | 02. | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan | 100% | | 100% | | 100% | | |
| 01. | 2. | 02. | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 98 orang | | 98 orang | | 98 orang | | |
| 01. | 2. | 02. | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 laporan | | 2 laporan | | 2 laporan | | |
| 01. | 2. | 02. | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----|--|--|----------------|--|----------------|--|--|----------------|--|
| | | | | Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD | dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD | | | | | | | |
| 01. | 2. | 05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase ASN yang mengimplementasik an hasil bimtek dan diklatnya | 100% | | 100% | | | 100% | |
| 01. | 2. | 05. | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 6 peserta | | 5 peserta | | | 5 peserta | |
| 01. | 2. | 06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi | 1 tahun | | 1 tahun | | | 1 tahun | |
| 01. | 2. | 06. | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia | 2 paket | | 2 paket | | | 2 paket | |
| 01. | 2. | 06. | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia | 6 paket | | 6 paket | | | 6 paket | |
| 01. | 2. | 06. | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah penggandaan yang tersedia | 32.000 lembar | | 32.000 lembar | | | 32.000 lembar | |
| | | | | | Jumlah barang cetakan yang tersedia | 70 eks | | 70 eks | | | 70 eks | |
| 01. | 2. | 06. | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan | Jumlah bahan bacaan atau buku peraturan | 450 eks | | 450 eks | | | 450 eks | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----|--|--|-------------|--|-------------|--|--|-------------|--|
| | | | | Perundang-undangan | yang tersedia | | | | | | | |
| 01. | 2. | 06. | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan | 100 laporan | | 100 laporan | | | 100 laporan | |
| 01. | 2. | 07. | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah yang dapat digunakan | 100% | | 100% | | | 100% | |
| 01. | 2. | 07. | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah mebel (meja kerja, set meja dan kursi tamu,dst) yang dibeli | 17 buah | | 17 buah | | | 17 buah | |
| 01. | 2. | 07. | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya (perontok padi) yang dibeli | 8 buah | | 8 buah | | | 8 buah | |
| 01. | 2. | 07. | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya (lahan pakir,pagar) yang terbangun | 3 paket | | 3 paket | | | 3 paket | |
| 01. | 2. | 08. | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah yang difasilitasi | 100% | | 100% | | | 100% | |
| 01. | 2. | 08. | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan lainnya yang | 4 macam | | 4 macam | | | 4 macam | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|-----|----|--|---|---------|--|---------|--|--|---------|--|--|
| | | | | | dapat digunakan | | | | | | | | |
| 01. | 2. | 08. | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Pegawai administrasi kantor non ASN aktif | 4 orang | | 4 orang | | | 4 orang | | |
| 01. | 2. | 09. | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik | 100% | | 100% | | | 100% | | |
| 01. | 2. | 09. | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara | 1 unit | | 1 unit | | | 1 unit | | |
| 501. | 2. | 09. | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara | 65 unit | | 65 unit | | | 65 unit | | |
| 01. | 2. | 09. | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 50 unit | | 50 unit | | | 50 unit | | |
| 01. | 2. | 09. | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara | 4 paket | | 4 paket | | | 4 paket | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----|--|---|----------|--|----------|--|--|----------|--|--|
| 01. | 2. | 09. | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara | 15 paket | | 15 paket | | | 15 paket | | |
| | | | | URUSAN KETAHANAN PANGAN | | | | | | | | | |
| 03. | | | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi | 90,25 | | 90,1 | | | 90,2 | | |
| 03. | 2. | 01. | | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Persentase cakupan pangan yang tersalurkan | 70% | | 65% | | | 70% | | |
| 03. | 2. | 01. | 01 | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | Jumlah Informasi neraca bahan makanan yang tersedia | 12 kali | | 12 kali | | | 12 kali | | |
| 03. | 2. | 01. | 02 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah beras yang disediakan | 4 ton | | 4 ton | | | 4 ton | | |
| 03. | 2. | 01. | 04 | Pemantauan Stok, | Jumlah laporan hasil | 12 kali | | 12 kali | | | 12 kali | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----|---|---|-----------|--|-----------|--|--|-----------|--|--|
| | | | | Pasokan dan Harga Pangan | pemantauan pasokan dan harga bahan pokok di Kota Banjarbaru | | | | | | | | |
| 03. | 2. | 02 | | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | Persentase pengadaan pangan untuk keseimbangan cadangan pangan daerah (%) | 0,033 | | 0,032 | | | 0,032 | | |
| 03. | 2. | 02 | | Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal | Jumlah rencana kebutuhan pangan lokal yang tersusun | 1 dokumen | | 1 dokumen | | | 1 dokumen | | |
| 03. | 2. | 02 | 03 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah cadangan pangan pemerintah yang tersedia | 23 ton | | 22 ton | | | 22 ton | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----|--|---|-----------|--|-----------|--|--|-----------|--|--|
| 03. | 2. | 04 | | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Angka Konsumsi Pangan | 1.788 | | 1.786,5 | | | 1.786,5 | | |
| | | | | | Persentase kelompok binaan (KWT) yang dibina | 5% | | 5% | | | 5% | | |
| 03. | 2. | 04 | 01 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per kapita per tahun | Jumlah dokumen target konsumsi pangan yang tersusun | 1 dokumen | | 1 dokumen | | | 1 dokumen | | |
| 03. | 2. | 04 | 02 | Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal | Jumlah pembinaan kelompok P2L yang dilaksanakan | 12 kali | | 12 kali | | | 12 kali | | |
| 05. | | | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Persentase PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan) yang aman | 70% | | 60% | | | 65% | | |
| 05. | 2. | 01 | | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Rekomendasi PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan) yang diterbitkan (%) | 100% | | 100% | | | 100% | | |
| 05. | 2. | 01 | 01 | Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota | Persentase PSAT yang diuji (%) | 100% | | 100% | | | 100% | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----|--|---|------------|--|------------|--|--|------------|--|--|
| 05 | 2. | 01 | 05 | Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota | Jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang tersedia (buah | 60 buah | | 60 buah | | | 60 buah | | |
| 07. | | | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Jumlah poktan yang naik kelas/score | 67,00 % | | 60,15% | | | 65,72% | | |
| 07. | 2. | 01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Jumlah kelembagaan penyuluhan dan petani (unit) | 4 unit | | 4 unit | | | 4 unit | | |
| 07. | 2 | 01. | 01 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Jumlah kompetensi penyuluh dan petani (orang) | 56 orang | | 52 orang | | | 52 orang | | |
| 07. | 2. | 01. | 02 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Jumlah kelompok tani yang naik kelas (kelompok) | 4 kelompok | | 4 kelompok | | | 4 kelompok | | |
| 07. | 2. | 01 | 03 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Jumlah media informasi (buah) | 6 buah | | 5 buah | | | 5 buah | | |
| 07 | 2. | 01 | 04 | Pembentukan Badan Usaha Milik Petani | Persentase jumlah kelompok tani yang berbadan hukum (kelompok) | 3% | | 2% | | | 2% | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----|--|--|--------------|--|--------------|--|--|--------------|--|--|
| | | | | URUSAN PERTANIAN | | | | | | | | | |
| 02. | | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Jumlah Produksi Tanaman Pangan (padi) | 6.943,81 ton | | 6.671,51 ton | | | 6.807,66 ton | | |
| | | | | | Jumlah Populasi ternak (ekor) | 2.851.000 | | 2.800.000 | | | 2.823.400 | | |
| 02. | 2. | 01 | | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Luas lahan yang digarap (ha) | 30 | | 30 | | | 30 | | |
| 02. | 2. | 01 | 01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 1 ha | | 0,5 ha | | | 0,5 ha | | |
| 02. | 2. | 01. | 02 | Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 6 | | 6 | | | 6 | | |
| 02. | 2. | 02 | | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Cakupan Pemanfaatan SDG tanaman (%) | 51 | | 45 | | | 45 | | |
| 02. | 2. | 02 | 01 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman | Persentase Sumber Daya genetik tanaman yang dimanfaatkan penangkar (%) | 100 | | 100 | | | 100 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----|---|--|----------|--|----------|--|--|----------|--|--|
| 02. | 2. | 03 | | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase jumlah kelahiran ternak yang berkualitas (%) | 35 | | 25 | | | 25 | | |
| 02. | 2. | 03 | 01 | Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | Jumlah ternak yang di inseminasi buatan | 100 ekor | | 50 ekor | | | 75 ekor | | |
| 02. | 2. | 05 | | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase ternak bantuan yang berproduksi (ekor) | 60 | | 50 | | | 50 | | |
| | | | | | Cakupan pengawasan peredaran bibit ternak di wilayah kota (%) | 10 | | 5 | | | 5 | | |
| 02. | 2. | 05 | 01 | Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak | Jumlah ternak yang didistribusikan ke masyarakat (ekor) | 500 ekor | | 500 ekor | | | 500 ekor | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----|--|--|----------|--|----------|--|--|----------|--|--|
| 03 | | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Prosentase prasarana pertanian yang tersedia | 100% | | 100% | | | 100% | | |
| 03. | 2. | 01 | | Pengembangan Prasarana Pertanian | Persentase prasarana pertanian yang ditingkatkan | 5 % | | 5% | | | 5% | | |
| | | | | | Persentase luas tanam hortikultura yang ditingkatkan | 10% | | 10% | | | 10% | | |
| | | | | | Persentase luas tanam perkebunan yang ditingkatkan | 0,0009 % | | 0,0009 % | | | 0,0009 % | | |
| 03. | 2. | 01 | 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya | Jumlah koordinasi yang dilaksanakan | 8 kali | | 6 kali | | | 6 kali | | |
| 03. | 2. | 01 | 04 | Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan | Jumlah dokumen masterplan yang tersusun | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | | | | | Peningkatan kualitas kadar kering karet (K3) | 42% | | 40% | | | 40% | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----|--|---|----------|--|----------|--|--|----------|--|--|
| 04 | | | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Jumlah hewan yang tertangani | 260 ekor | | 240 ekor | | | 250 ekor | | |
| 04. | 2. | 01 | | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kasus penyakit zoonosis dan penyakit menular ternak yang tertangani | 100% | | 100% | | | 100% | | |
| 04. | 2. | 01. | 01 | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Jumlah vaksinasi rabies pada hewan pembawa rabies | 550 ekor | | 450 ekor | | | 500 ekor | | |
| 04. | 2. | 01. | 02 | Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah hewan/ternak yang di obati | 50 ekor | | 20 ekor | | | 25 ekor | | |
| 04. | 2. | 02 | | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase tempat pemotongan hewan yang dibina | 10% | | 10% | | | 10% | | |
| 04. | 2. | 02. | 01 | Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan | Jumlah sampel produk asal hewan yang diambil | 5 sampel | | 5 sampel | | | 5 sampel | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----|---|--|------------|--|------------|--|--|------------|--|--|
| | | | | URUSAN PERIKANAN | | | | | | | | | |
| 04. | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton) | 399,55 ton | | 362,40 | | | 380,52 | | |
| 04. | 2. | 02 | | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah rumah tangga pembudidaya ikan (RTP) yang mendapatkan bantuan fasilitasi usaha dari pemerintah | 10 RTP | | 10 RTP | | | 10 RTP | | |
| 04. | 2. | 02 | 04 | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah Pokdakan/UPR yang telah menerapkan CPIB, CBIB | 5 kelompok | | 5 kelompok | | | 5 kelompok | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----|---|---|------------------|--|-----------|--|--|-----------|--|--|
| 05. | | | | PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap | 35,05 ton | | 31,8 | | | 33,39 | | |
| 05. | 2. | 01 | | Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota | Jumlah sumberdaya perikanan yang dapat diusahakan | 1 kawasa n | | 1 kawasan | | | 1 kawasan | | |
| 05. | 2. | 01 | 01 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota | Jumlah pengawasan pelaku usaha perikanan tangkap yang dilaksanakan | 12 kali | | 12 kali | | | 12 kali | | |
| 06. | | | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Prosentase pertumbuhan produksi olahan hasil perikanan | 2% | | 113,15 | | | 2% | | |
| 06. | 2. | 02 | | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Jumlah produksi usaha poklarsar yang dinyatakan berkualitas dan aman | 116,28 ton | | 112,5 ton | | | 114 ton | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----|--|--|------------|--|------------|--|--|------------|--|--|
| 06. | 2 | 02 | 01 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Jumlah Poklamsar yang telah melaksanakan pengolahan yang baik berdasarkan CPIB | 2 kelompok | | 1 kelompok | | | 1 kelompok | | |
| 06. | 2. | 03 | | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Angka Konsumsi (kg/kapita/tahun) | 50,5 | | 50 | | | 50 | | |
| 06. | 2. | 03 | 01 | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Poklamsar baru | 1 kelompok | | 1 kelompok | | | 1 kelompok | | |
| 06. | 2. | 03 | 02 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Poklamsar yang mendapatkan fasilitas | 2 kelompok | | 2 kelompok | | | 2 kelompok | | |

Tabel 2.1.1.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja UPT. Balai Pembibitan Ternak Pusat Kesehatan Hewan (BPTPKH)
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kota Banjarbaru

Kegiatan Tahun 2021 Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | | | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 | | | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2021) | | |
|------|--|----|--|---|--|---|---|----------------------|----------------------|---|--|--|
| | | | | | | | Target Renja SKPD | Realisasi Renja SKPD | Target Realisasi (%) | Target Renja SKPD | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10= (5+7+9) | 11= (10/4) |
| | | | | Urusan Semua SKPD | | | | | | | | |
| 02. | | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Jumlah Populasi ternak (ekor) | 2.851.000 ekor | 2.800.000 ekor | | | 2.823.400 ekor | | |
| 02. | 2. | 05 | | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak | Prosentase ternak bantuan yang berproduksi (%) | 60 | 50 | | | 50 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----|--|--|-----------|---------|-----------|--|--|-----------|--|--|
| | | | | dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | |
| | | | | | Cakupan pengawasan peredaran bibit ternak di wilayah kota (%) | 10 | | 5 | | | 5 | | |
| 04 | | | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Jumlah hewan yang tertangani | 260 ekor | | 240 ekor | | | 250 ekor | | |
| 04. | 2. | 03 | | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelayanan jasa laboratorium dan medik Veteriner tepat waktu dan tepat syarat | 75% | 1 tahun | 75% | | | 75% | | |
| 04. | 2. | 03. | 01 | Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium | Jumlah pelayanan penanganan kesehatan hewan (ekor) | 28 ekor | 1 tahun | 25 ekor | | | 25 ekor | | |
| | | | | | Jumlah pelayanan jasa laboratorium (sampel) | 28 sampel | | 24 sampel | | | 24 sampel | | |

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja UPT. Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar (PPBAT)
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kota Banjarbaru

Kegiatan Tahun 2021 Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 | | | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2021) | | |
|------|----|----|--|--|--|--|--|---|---|----------------------|----------------------|---|--|--|
| | | | | | | | | | Target Renja SKPD | Realisasi Renja SKPD | Target Realisasi (%) | Target Renja SKPD | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10= (5+7+9) | 11= (10/4) |
| | | | | | Urusan Semua SKPD | | | | | | | | | |
| 04. | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton) | 399,55 ton | | 362,40 | | | 380,52 | | |
| 04. | 2. | 04 | | | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Jumlah Produksi Benih Calon Induk Unggul dan Produksi Benih Sebar (ekor) | 550.000 ekor | | 500.000 ekor | | | 500.000 ekor | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----|--|-----------------------------------|--------|--|--------|--|--|--------|--|--|
| 04. | 2. | 04 | 02 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah prasarana pembudidaya ikan | 7 buah | | 5 buah | | | 5 buah | | |
|-----|----|----|----|--|-----------------------------------|--------|--|--------|--|--|--------|--|--|

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas

Berikut ini beberapa capaian indikator kinerja pelayanan dinas sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Sasaran Renstra

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru

| No. | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi | Satuan | Target Renstra Tahun 2016-2021 | | | | | Realisasi Capaian Tahun 2016-2021 | | | | | Rasio Capaian Tahun | | | | |
|-----|--|--------|--------------------------------|-------|-------|-------|------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------------|------|--------|--------|--------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | Bidang Pangan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ketersediaan Pangan Masyarakat (Score PPh Ketersediaan) | score | 73,59 | 80,09 | 82 | 84 | 86 | 73,59 | 80,09 | 81,93 | 82,68 | 80,11 | 100% | 100% | 99,9% | 98,43% | 93% |
| 2. | Score PPh Pola Konsumsi | score | Na | Na | 91,20 | 90,20 | 90,7 | Na | Na | 89,20 | 89,9 | 90,1 | Na | Na | 97,71% | 99,66% | 99,33% |
| 3. | Persentase sarana media elektronik dan media cetak yang dapat dijangkau oleh | % | 46 | 66 | 66 | 88 | 88 | 46 | 66 | 66 | 88 | 88 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|------|--------|---------|---------|---------|
| | penyuluh pertanian dan masyarakat petani | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Persentase kenaikan kelas BPP | % | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5. | Prosentase Kelas Kelompok Tani | | Na | Na | 34,55 | 50,91 | 67,27 | Na | Na | 34,55 | 50,91 | 67,27 | Na | Na | 100% | 100% | 100% |
| 6. | Prosentase tenaga penyuluh pertanian PNS yang memiliki sertifikat | | Na | Na | 25 | 31,25 | 37,50 | Na | Na | 6,25 | 41 | 37,50 | Na | Na | 25% | 131,20% | 100% |
| 7. | Prosentase tenaga penyuluh pertanian Non PNS yang memiliki sertifikat (STTPL) | | Na | Na | 38,46 | 53,85 | 69,23 | Na | Na | 63,63 | 53,85 | 69,23 | Na | Na | 165% | 100% | 100% |
| 8. | Prosentase tenaga penyuluh pertanian yang berkinerja baik | | Na | Na | 100 | 100 | 100 | Na | Na | 100 | 100 | 100 | Na | Na | 100% | 100% | 100% |
| | Bidang Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Total Produksi Tanaman Padi Pertahun | ton | 5.700 | 5.950 | 6.123 | 6.296 | 6.649 | 5.700 | 6.100 | 7.184 | 6.728 | 7.108 | 100% | 97,54% | 112% | 106,86% | 106,90% |
| 10. | Total Produksi Tanaman Cabe Pertahun | ton | 700 | 710 | 731 | 752 | 773 | 700 | 710 | 941,8 | 774,7 | 510 | 100% | 100% | 128,84% | 103,2% | 78,46% |
| 11. | Total Produksi Tanaman Karet Pertahun | ton | 900 | 937 | 952 | 967 | 982 | 900 | 937 | 974,945 | 974 | 958,6 | 100% | 100% | 102,4% | 100,72% | 127,93% |
| 12. | Peningkatan Hasil Peternakan | ekor | Na | Na | 2.659.793 | 2.712.413 | 2.766.840 | Na | Na | 2.660.399 | 2.792.257 | 2.820.347 | Na | Na | 100,02% | 102,94% | 101,93% |
| 13. | Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Zoonosa (kasus) | kasus | Na | Na | 60 | 57 | 54 | Na | Na | 86 | 21 | 24 | Na | Na | 143,3% | 36,84% | 44% |
| 14. | Ternak yang terserang penyakit (ekor) | ekor | Na | Na | 110 | 105 | 100 | Na | Na | 272 | 66 | 83 | Na | Na | 247,27% | 62,86% | 83% |
| 15. | Prosentase Produk Pangan Segar Peternakan | % | Na | Na | 4 | 3 | 2 | Na | Na | 1 | 1 | 1 | Na | Na | 25% | 33,33% | 50% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|--------|----------|--------|--------|------|---------|------|
| | Bidang Perikanan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Produksi Perikanan Budidaya | ton | 5.550,65 | 5.828,18 | 6.119,59 | 6.425,57 | 6.749,85 | 5.550,65 | 5.828,18 | 6.500 | 6.860 | 3.120,50 | 100% | 100% | 106% | 106,76% | 46% |
| 17. | Produksi Perikanan Tangkap | ton | 57,32 | 58,47 | 59,84 | 60,83 | 62,05 | 57,32 | 58,47 | 59,84 | 70 | 36,2 | 100% | 100% | 100% | 115,07% | 58% |
| 18. | Produksi Hasil Olahan Perikanan | ton | 69,8 | 78 | 85,8 | 94,38 | 103,8 | 70,46 | 88,22 | 350 | 113,15 | 158,82 | 99,06% | 88,41% | 408% | 119,89% | 153% |

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berikut ini isu isu penting dari perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas :

“Belum Optimalnya Ketersediaan Pangan Masyarakat”.

Penetapan isu tersebut didasarkan kepada beberapa kondisi daerah saat ini, yaitu sebagai berikut :

1. Berkurangnya lahan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan karena tingginya alih fungsi lahan ;
2. Kelompok Tani sebagian besar belum memiliki badan hukum ;
3. Minat masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan semakin berkurang ;
4. Sumber daya aparatur yang belum berkarakter dan berjiwa melayani ;
5. Daya saing produk rendah ;
6. Belum optimalnya penerapan teknologi tepat guna pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan ;
7. Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berikut ini beberapa hal penting dari Rancangan Awal RKPD yang menjadi landasan pembangunan kaitannya dengan rencana kerja dinas.

a. Prioritas Pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2024

Prioritas pembangunan periode Tahun 2021-2026 adalah memperkuat keterkaitan antara simpul pembangunan sektoral dan simpul pembangunan kewilayahan, dengan arah kebijakan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru :

1. Melaksanakan pengadaan cadangan pangan daerah.
2. Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan
3. Penyusunan rencana kebutuhan pangan lokal.
4. Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan perkapita/tahun.
5. Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
6. Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah kabupaten /Kota.
7. Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/Kota.
8. Pemberian pendampingan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi , serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
9. Pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/Kota.
10. Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan
11. Pengawasan usaha perikanan tangkap di perairan umum.
12. Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil.

13. Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengoahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota.
14. Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 daerah Kabupaten Kota.
15. Pengawasan dan pendampppenggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi.
16. Pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan tanaman skala kecil.
17. Penjaminan peredaran benih/bbibit ternak
18. Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian.
19. Pembebasan penyakit hewan menular dan zoonosis.
20. Penyediaan pelayanan jasa laboratorium da medik veterinar.
21. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamaytan dan desa.
22. Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa
23. Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian.

Dalam rangka mengarahkan proses pembangunan Kota Banjarbaru pada tahun 2024, penentuan prioritas pembangunan pada tahun 2024 didasarkan kepada hal-hal berikut :

1. Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD yang diterjemahkan kedalam indikator sasaran yang hendak dicapai selama 5 tahun kedepan dari tahun 2021-2026
2. Program prioritas dalam RPJMD tahun 2021 – 2026 sebagai penjabaran sasaran dan pencapaian indikator sasaran yang ingin dicapai.
3. Tema dan kebijakan pembangunan tahun 2023 berdasarkan pada RPJMD tahun 2021 - 2026.
4. Permasalahan mendesak dan isu strategis pada tahun 2024.

Begitu pula dengan sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru turut mendukung tercapainya sasaran yang tertuang dalam Renstra SKPD seperti ;

1. Peningkatan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat ;
2. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan ;
3. Peningkatan Pengelolaan Perikanan Budidaya ;
4. Peningkatan Sumberdaya Perikanan ;
5. Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan ;
6. Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian/Peternakan ;
7. Peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian ;
8. Peningkatan Status Kesehatan Hewan di Kota Banjarbaru ;
9. Peningkatan Kelembagaan Penyuluhan dan Petani.

Adapun Strategi Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru, yaitu ;

1. Peningkatan penyaluran pangan pokok sesuai dengan kebutuhan daerah..
2. Peningkatan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangani.
3. Peningkatan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun..
4. Peningkatan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.
5. Peningkatan pengelolaan perikanan budidaya.
6. Peningkatan sumberdaya perikanan
7. Peningkatan produksi olahannhasil perikanan.
8. Peningkatan pengembangan sarana pertanian/peternakan
9. Peningkatan populasi ternak.
10. Peningkatan penyediaan prasaran pertanian
11. Peningkatan status kesehatan hewan
12. Peningkatan kelembagaan penyuluhan dan petani

Tabel 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
KOTA BANJARBARU

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|--------|--|-------------------|-------------------------------|---|--------|--|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah | B | 9.624.946 | | | Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah | B | 9.624.946 | |
| | | | Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi | 100 | 1.254.955 | | | Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi | 100 | 1.254.955 | |
| | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan | | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | 90,25 | 1.532.450 | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan | | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi | 90,25 | 1.344.565 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|-----------|------------|--|---|-----------|-----------|--|
| | Pangan Masyarakat | | Konsumsi | | | Masyarakat | | | | | |
| | Pengawasan Keamanan Pangan | | Persentase PSAT(Pangan Segar Asal Tumbuhan) yang aman | 70 | 99.455 | | | Persentase PSAT(Pangan Segar Asal Tumbuhan) yang aman | 70 | 99.455 | |
| | Pengelolaan Perikanan Budidaya | | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton) | 399,55 | 329.992 | | | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton) | 399,55 | 329.992 | |
| | Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton) | 35,05 ton | 19.261 | | | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap | 35,05 ton | 19.261 | |
| | Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | | Persentase pertumbuhan produksi olahan hasil perikanan | 2 % | 178.670 | | | Jumlah Produksi Hasil Olahan | 2% | 178.670 | |
| | Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | | Jumlah produksi tanaman pangan (padi) | 6.943,81 | 666.194 | | | Jumlah produksi tanaman pangan (padi) | 6.943,81 | 666.194 | |
| | | | Jumlah populasi ternak | 2.851.000 | 1.507.650 | | | Jumlah populasi ternak | 2.851.000 | 1.507.650 | |
| | Penyediaan dan Pengembangan Prasarana | | Persentase Prasarana Pertanian yang | 100 | 175.480 | | | Persentase Prasarana Pertanian yang | 100 | 175.480 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|----------|---------|--|--|--|----------|---------|--|
| | Pertanian | | diaplikasikan | | | | | diaplikasikan | | | |
| | Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | | Jumlah hewan yang tertangani | 260 ekor | 88.954 | | | Jumlah hewan yang tertangani | 260 ekor | 88.954 | |
| | Penyuluhan Pertanian | | Persentase Poktan yang naik kelas/score | 67,00 | 461.485 | | | Persentase Poktan yang naik kelas/scorei | 67 | 461.485 | |

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Terdapat usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui mekanisme MUSRENBANG kecamatan dan kota serta Forum Gabungan SKPD sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan perikanan Budidaya, terdapat 4 (empat) usulan.
2. Program Penyediaan dan pengembanganhhhhhhhhhh Sarana Pertanian, terdapat 22 usulan.
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, terdapat 3 usulan.

Selain melalui mekanisme Musrenbang Kecamatan dan Kota, usulan program dan kegiatan yang diusulkan masyarakat bisa juga melalui pokok – pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Banjarbaru.

Tabel 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
KOTA BANJARBARU

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

| No. | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/Volume | Catatan |
|-----|---|--------|--|----------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah | B | |
| | | | Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi | 100% | |
| 2. | Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi | 90,35 | |
| 3. | Pengawasan Keamanan Pangan | | Persentase PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan) yang aman | 75% | |
| 4. | Pengelolaan Perikanan Budidaya | | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton) | 411,62 | |
| 5. | Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton) | 36,46 | |
| 6. | Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | | Persentase pertumbuhan produksi olahan hasil perikanan | 10% | |
| 7. | Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | | Jumlah Produksi Tanaman Pangan (padi) (ton) | 7.224,34 | |
| | | | Total Populasi Ternak (ekor) | 2.8905.400 | |
| 8. | Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | | Persentase Prasarana Pertanian yang diaplikasikan | 100 | |
| 9. | Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | | Jumlah hewan yang tertangani (ekor) | 290 | |
| 10. | Penyuluhan Pertanian | | Persentase poktan yang naik kelas/score | 69,0 % | |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

a. Arah Kebijakan Nasional Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Ketahanan Pangan

Arah kebijakan bidang Ketahanan Pangan adalah peningkatan kedaulatan pangan yang dicerminkan pada kekuatan mengatur masalah pangan secara mandiri, yang perlu didukung dengan ;

- a. Ketahanan Pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri
- b. Pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri ; dan
- c. Mampu melindungi dan mensejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani/kelompok tani dan nelayan

Perikanan

Arah kebijakan umum Nasional bidang Perikanan sebagai berikut :

1. Memperkuat kelembagaan dan sumberdaya manusia secara terintegrasi.
2. Mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan.
4. Memperluas akses pasar domestik dan internasional.

Pertanian

Arah kebijakan umum Nasional bidang Pertanian adalah Mewujudkan sistem pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal, meningkatkan dan memantapkan swasembada berkelanjutan,

menumbuhkembangkan ketahanan pangan dan gizi termasuk diversifikasi pangan, meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor produk pertanian, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Di bidang Perkebunan adalah pengembangan komoditas perkebunan strategis, pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perkebunan, pengembangan sumber daya insani (SDI) perkebunan, penguatan kelembagaan pekebun dan kemitraan usaha perkebunan.

Peternakan

Arah Kebijakan di bidang Peternakan adalah stabilitasi pasokan dan harga daging. Kebijakan ini didasari kebutuhan daging sapi dalam negeri yang terus meningkat dari tahun ke tahun dengan harga daging di Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN, sehingga presiden harus menetapkan langkah dalam mengendalikan dan menstabilkan harga. Langkah –langkah dalam meningkatkan produksi daging sapi dalam negeri ;

- Upaya peningkatan populasi
- Pengembangan logistik dan distribusi
- Perbaikan tata niaga sapi dan daging sapi
- Penguatan kelembagaan melalui sentra peternakan rakyat (SPR)

b. Prioritas Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan

Ketahanan Pangan

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
2. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Perikanan

1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.
2. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pertanian dan Peternakan

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
4. Program Penyuluhan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan :

Tujuan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru adalah :

“Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat”.

Sasaran :

Sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru adalah :

1. Peningkatan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat ;
2. Pengawasan Keamanan Pangan ;
3. Peningkatan Pengelolaan Perikanan Budidaya ;
4. Peningkatan Sumberdaya Perikanan ;
5. Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan ;
6. Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian/Peternakan ;
7. Peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian ;
8. Peningkatan Status Kesehatan Hewan di Kota Banjarbaru ;
9. Peningkatan Kelembagaan Penyuluhan dan Petani.

PROGRAM DAN KEGIATAN

Beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan dinas tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- Pencapaian Visi Kepala Daerah, yaitu Terwujudnya Banjarbaru Maju, Agamis, dan Sejahtera, dan Misi 2 dari Kepala Daerah, yaitu Meningkatkan pembangunan perekonomian daerah yang berkelanjutan dengan kearifan lokal dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup yang diterjemahkan kedalam sasaran RPJMD 2021- 2026. Selain itu juga untuk mendukung Program Juara Kepala Daerah yang terkait dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru yaitu “PROGRAM JUARA URBAN FARMING” dalam rangka mengembangkan Pertanian, Perikanan, Peternakan dan penyediaan Bantuan Bibit Unggul, Pupuk serta alat dan mesin Pertanian.

Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan adalah 10 (sepuluh) program, terdiri 1 (satu) program urusan semua SKPD, 2 (dua) program Urusan Wajib, dan 7 (tujuh) program Urusan Pilihan, dengan total kegiatan 24 (dua puluh empat) kegiatan dan total sub Kegiatan 51 (lima puluh satu) sub kegiatan. Kebutuhan dana/pagu indikatif yg direncanakan untuk menjalankan keseluruhan program adalah Rp 26.227.254.593,- (dua puluh enam milyar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh empat lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang bersumber dari dana APBD dan DAK Kota Banjarbaru. Adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut ;

**Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kota Banjarbaru**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | | |
|------|----|----|------|------|---|---|---|--|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Progra m | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegia tan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | | | | | | | | 24.573.955.240,00 | | | | 20.689.021.553,00 | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | 15.771.058.840,00 | | | | 14.677.839.253,00 | |
| 2 | 09 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | | | | | 15.771.058.840,00 | | | | 14.677.839.253,00 | |
| 2 | 09 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | 14.772.982.340,00 | | | | 13.420.423.253,00 | |
| 2 | 09 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | 352.635.750,00 | | | | 56.396.000,00 | |
| 2 | 09 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BB indeks | 2 Dokumen | 100 % | 25.635.750,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 30.636.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|---|---|--|--|--|-----------|----------------|-------|-------------------|--|--|--|----------------|-------------------|
| | | | | | | Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BB indeks | 3 Laporan | 100 % | 327.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan | 25.760.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | 12.490.496.140,00 | | | | | 11.709.377.253,00 |
| 2 | 09 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BB indeks | 98 Orang/bulan | 100 % | 12.441.936.140,00 | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 98 Orang/bulan | 11.657.017.253,00 |
| 2 | 09 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|---|---|--|---|--|-----------|-----------|-------|---------------|------------------------------|--|---|-----------|---------------|
| | | | | | | Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BB indeks | 1 Laporan | 100 % | 23.560.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 24.860.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BB indeks | 1 Laporan | 100 % | 25.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | 27.500.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | | 30.868.000,00 | | | | | 33.868.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | 2.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|--|---|--|--|--|-----------|-----------|-------|----------------|------------------------------|--|--|-----------|----------------|
| | | | | | | Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Persentase laporan barang milik daerah yang disusun sesuai ketentuan | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BB indeks | 1 Laporan | 100 % | 30.868.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 33.868.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | 2.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | 851.516.500,00 | | | | | 472.306.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | 2.06 | 0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BB indeks | 3 Paket | 100 % | 28.911.500,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 31.806.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | 2.06 | 0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BB indeks | 6 Paket | 100 % | 220.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 242.000.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | 2.06 | 0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BB indeks | 3 Paket | 100 % | 20.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 22.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|------|--|--|--|--|-----------|-----------|-------|----------------|------------------------------|--|--|-----------|----------------|
| 2 | 0 | 0 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BB indeks | 1 Dokumen | 100 % | 6.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 6.600.000,00 |
| 2 | 0 | 0 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BB indeks | 1 Laporan | 100 % | 576.605.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 169.900.000,00 |
| 2 | 0 | 0 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | 155.149.000,00 | | | | 55.000.000,00 |
| 2 | 0 | 0 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BB indeks | 10 Unit | 100 % | 155.149.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | 55.000.000,00 |
| 2 | 0 | 0 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | 620.108.300,00 | | | | 706.041.000,00 |
| 2 | 0 | 0 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | - | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | 1 Laporan | 100 % | 338.300.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber | 1 Laporan | 405.200.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|---|---|--|---|--|-----------|-----------|-------|----------------|------------------------------|--|--|-----------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| 2 | 09 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | 1 Laporan | 100 % | 281.808.300,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 300.841.000,00 | |
| 2 | 09 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | 272.208.650,00 | | | | | | 387.435.000,00 |
| 2 | 09 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BB indeks | 1 Unit | 100 % | 31.733.650,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 34.775.000,00 | |
| 2 | 09 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BB indeks | 100 Unit | 100 % | 219.795.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan | 100 Unit | 329.800.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|--|---|--|--|--|---------------|-----------|-------|----------------|------------------------------|--|---|-----------|---------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | |
| 2 | 09 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BB indeks | 50 Unit | 100 % | 14.780.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 50 Unit | 15.880.000,00 | |
| 2 | 09 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BB indeks | 10 Unit | 100 % | 5.900.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 10 Unit | 6.980.000,00 | |
| 2 | 09 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | | | | | | 824.694.350,00 | | | | | | 1.026.763.500,00 |
| 2 | 09 | 03 | 2.01 | | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | | | | | | | | 96.512.900,00 | | | | | | 128.700.000,00 |
| 2 | 09 | 03 | 2.01 | 0012 | Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi | Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota | Peningkatan Penyaluran Pangan Pokok Sesuai dengan Kebutuhan Daerah | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 90,35 scoring | 1 Laporan | 80 % | 48.449.900,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen | 1 Laporan | 58.450.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|------|------|--|--|---|---|---|------------------|--------------|---|-------------------|--|--|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | wilayah Kabupaten/ Kota | | | |
| 2 | 0 9 | 0 3 | 2.01 | 0016 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) | Peningkatan Penyaluran Pangan Pokok Sesuai dengan Kebutuhan Daerah | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 90,35 scoring | 1 Dokumen | 80 % | 48.063.000,0 0 | PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) | | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) | 1 Dokum en | 70.250.000,00 | |
| 2 | 0 9 | 0 3 | 2.02 | | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | 229.457.150,00 | | | | | 269.719.200,00 |
| 2 | 0 9 | 0 3 | 2.02 | 0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi | Rencana Kebutuhan Pangan Lokal | Peningkatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kota | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 90,35 scoring | 1 Dokumen | 0.4 % | 86.223.200,0 0 | PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) | | Rencana Kebutuhan Pangan Lokal | 1 Dokum en | 113.685.200,00 | |
| 2 | 0 9 | 0 3 | 2.02 | 0003 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Peningkatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kota | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 90,35 scoring | 10 Ton | 0.4 % | 143.233.950,00 | PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota | 10 Ton | 156.034.000,00 | |
| 2 | 0 9 | 0 3 | 2.04 | | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | | | | | | | | | 498.724.300,00 | | | | | 628.344.300,00 |
| 2 | 0 9 | 0 3 | 2.04 | 0001 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | Peningkatan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 90,35 scoring | 1 Dokumen | 1.79 2 Kkal/ Kapit a/ha ri | 20.006.000,0 0 | PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) | | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | 1 Dokum en | 55.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|--|---|---|---|--|---------------|-----------|------------------------|----------------|------------------------------|--|---|-----------|----------------|
| 2 | 09 | 03 | 2.04 | 0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Peningkatan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 90,35 scoring | 1 Laporan | 1.792 Kkal/Kapita/hari | 478.718.300,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 1 Laporan | 573.344.300,00 |
| 2 | 09 | 05 | | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | | | | | | | | 173.382.150,00 | | | | | 230.652.500,00 |
| 2 | 09 | 05 | 2.01 | | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 173.382.150,00 | | | | | 230.652.500,00 |
| 2 | 09 | 05 | 2.01 | 0004 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Cakupan pengawasan keamanan pangan segar yang beredar di kota (%) | Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Keamanan Pangan Melalui Pengujian PSAT | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75 % | 1 Dokumen | 100 % | 19.999.850,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 22.000.000,00 |
| 2 | 09 | 05 | 2.01 | 0007 | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Cakupan pengawasan keamanan pangan segar yang beredar di kota (%) | Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota | Peningkatan Keamanan Pangan Melalui Pengujian PSAT | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75 % | 1 Dokumen | 100 % | 153.382.300,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah | 1 Dokumen | 208.652.500,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|------|------|---|--|--|---|---|--------------|--------------|----------|--------------------|--|--|---|------------------|----------------|
| 3 | 2 5 | 0 5 | | | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | | | 50.000.000,0 0 | | | | | 55.000.000,00 |
| 3 | 2 5 | 0 5 | 2.01 | | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | | | | | | | | 50.000.000,0 0 | | | | | 55.000.000,00 |
| 3 | 2 5 | 0 5 | 2.01 | 0001 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Peningkatan Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai,Danau,Wadu k,Rawa dan Genangan Air | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 36,46 Ton | 1 Dokumen | 100 % | 50.000.000,0 0 | PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasa n Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota | 1 Dokum en | 55.000.000,00 |
| 3 | 2 5 | 0 6 | | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | | | | | | | | 193.605.900, 00 | | | | | 260.345.000,00 |
| 3 | 2 5 | 0 6 | 2.02 | | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | | | | | | | | 31.199.850,0 0 | | | | | 33.000.000,00 |
| 3 | 2 5 | 0 6 | 2.02 | 0001 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|--|--|---|---|--|-----|--------------|-----------|----------------|------------------------------|--|---|--------------|----------------|
| | | | | | | Persentase pertumbuhan produksi olahan hasil perikanan | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko | Peningkatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 % | 7 Unit Usaha | 100 % | 31.199.850,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko | 7 Unit Usaha | 33.000.000,00 |
| 3 | 25 | 06 | 2.03 | | | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | 162.406.050,00 | | | | | 227.345.000,00 |
| 3 | 25 | 06 | 2.03 | 0001 | | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan produksi olahan hasil perikanan | Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 % | 140.8 Ton | 10 pelaku | 54.999.750,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 140.8 Ton | 60.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|------|--|--|---|---|--|-------------|----------------|------------------|------------------|------------------------------|--|--|------------------|----------------|
| 3 | 2 | 0 | 2.03 | 0002 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan produksi olahan hasil perikanan | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi | Peningkatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 % | 2 Pelaku Usaha | 10 pelaku u | 107.406.300,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi | 2 Pelaku Usaha | 167.345.000,00 |
| 3 | 2 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | | | 6.746.300.100,00 | | | | | 5.305.616.900,00 | |
| 3 | 2 | 0 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | | | 4.617.503.500,00 | | | | | 2.909.238.000,00 | |
| 3 | 2 | 0 | 2.01 | | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | | | | | | | 2.520.297.500,00 | | | | | 1.394.600.000,00 | |
| 3 | 2 | 0 | 2.01 | 0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Produksi Tanaman Pangan (padi) | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Peningkatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7224,34 ton | 1 Laporan | 0,5 % | 1.836.900.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 1 Laporan | 696.900.000,00 |
| 3 | 2 | 0 | 2.01 | 0009 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Produksi Tanaman Pangan (padi) | Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak | Peningkatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7224,34 ton | 500 Batang | 0,5 % | 154.060.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak | 500 Batang | 159.700.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|------|---|--|---|---|---|------------------|--------------|-------------|----------------------|--|--|--|------------------|----------------------|
| 3 | 2 | 0 | 2.01 | 0012 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Produksi Tanaman Pangan (padi) | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan | Peningkatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7224,3 4 ton | 1 Laporan | 0,5 % | 279.337.500, 00 | PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah pengawasa n penggunaa n sarana pengolahan hasil Perkebuna n | 1 Lapora n | 288.000.000,00 |
| 3 | 2 | 0 | 2.01 | 0016 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Produksi Tanaman Pangan (padi) | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura | Peningkatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7224,3 4 ton | 1 Laporan | 0,5 % | 250.000.000, 00 | PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah pengawasa n penggunaa n sarana pascapanen hortikultur a | 1 Lapora n | 250.000.000,00 |
| 3 | 2 | 0 | 2.06 | | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | | | | | | 2.097.206.00 0,00 | | | | | 1.514.638.000,0 0 |
| 3 | 2 | 0 | 2.06 | 0003 | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Populasi Ternak | Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain | Peningkatan Pengembangan Ternak | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 290540 0 Ekor | 500 Ekor | 500 ekor | 2.097.206.00 0,00 | PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/ kota lain | 500 Ekor | 1.514.638.000,0 0 |
| 3 | 2 | 0 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | | | | | 797.399.900, 00 | | | | | 849.999.900,00 |
| 3 | 2 | 0 | 2.01 | | Pengembangan Prasarana Pertanian | | | | | | | | 797.399.900, 00 | | | | | 849.999.900,00 |
| 3 | 2 | 0 | 2.01 | 0005 | Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|--|---|--|---|--|----------------|-----------|-------|----------------|--|--|--|-----------|----------------|
| | | | | | | Persentase Cakupan Prasarana Pertanian yang disediakan (%) Persentase Prasarana Pertanian yang diaplikasikan | Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan | Peningkatan Pengembangan Prasarana Pertanian | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % 100 % | 35 Ha | 5 % | 422.400.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan | 35 Ha | 475.000.000,00 |
| 3 | 27 | 03 | 2.01 | 0015 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase Cakupan Prasarana Pertanian yang disediakan (%) Persentase Prasarana Pertanian yang diaplikasikan | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola | Peningkatan Pengembangan Prasarana Pertanian | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % 100 % | 1 Dokumen | 5 % | 374.999.900,00 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola | 1 Dokumen | 374.999.900,00 |
| 3 | 27 | 04 | | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | | | | | | 296.284.000,00 | | | | | 483.084.000,00 |
| 3 | 27 | 04 | 2.01 | | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 233.384.000,00 | | | | | 415.384.000,00 |
| 3 | 27 | 04 | 2.01 | 0003 | Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah hewan yang tertangani | Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali | Peningkatan Pelayanan Penyakit Zoonosis dan Penyakit Menular Ternak | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 290 ekor | 4 Laporan | 100 % | 188.954.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali | 4 Laporan | 366.954.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|------|---|------------------------------|---|--|--|----------|-----------|-------|------------------|------------------------------|--|---|-----------|------------------|
| 3 | 2 | 0 | 2.01 | 0008 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah hewan yang tertangani | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | Peningkatan Pelayanan Penyakit Zoonosis dan Penyakit Menular Ternak | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 290 ekor | 4 Laporan | 100 % | 44.430.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | 4 Laporan | 48.430.000,00 |
| 3 | 2 | 0 | 2.02 | | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 62.900.000,00 | | | | | 67.700.000,00 |
| 3 | 2 | 0 | 2.02 | 0007 | Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah hewan yang tertangani | Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya | Peningkatan Pembinaan Tempat Pemotongan (Tempat Pemotongan Hewan dan Tempat Pemotongan Unggas) | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 290 ekor | 4 Laporan | 100 % | 62.900.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya | 4 Laporan | 67.700.000,00 |
| 3 | 2 | 0 | | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | | | | | | 1.035.112.700,00 | | | | | 1.063.295.000,00 |
| 3 | 2 | 0 | 2.01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | | | | | | | | 1.035.112.700,00 | | | | | 1.063.295.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|------|--|--|--|--|--|------|---------|--------|----------------|--|--|--|---------|----------------|
| 3 | 2 | 0 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prosentase Jumlah Poktan yang Naik/Score | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Peningkatan Kompetensi Penyuluh dan Petani | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 69 % | 5 Unit | 5 unit | 242.926.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 5 Unit | 253.540.000,00 |
| 3 | 2 | 0 | 2.01 | 0002 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prosentase Jumlah Poktan yang Naik/Score | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Peningkatan Kompetensi Penyuluh dan Petani | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 69 % | 4 Unit | 5 unit | 331.351.300,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 4 Unit | 364.760.000,00 |
| 3 | 2 | 0 | 2.01 | 0003 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prosentase Jumlah Poktan yang Naik/Score | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Peningkatan Kompetensi Penyuluh dan Petani | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 69 % | 10 Unit | 5 unit | 383.335.700,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | 10 Unit | 334.995.000,00 |
| 3 | 2 | 0 | 2.01 | 0008 | Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Prosentase Jumlah Poktan yang Naik/Score | Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk | Peningkatan Kompetensi Penyuluh dan Petani | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua | 69 % | 5 Unit | 5 unit | 77.499.700,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk | 5 Unit | 110.000.000,00 |

[illegible]

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Nama Perangkat Daerah : UPT. Balai Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar Dinas Pertanian dan Perikanan
Kota Banjarbaru

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | | |
|------|----|----|--|--|---|-------------------|-----------------------|----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|--------|-------------------------------------|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Progra m | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiat an | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | UPT PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR | | | | | | 541.817.500,00 | | | | 627.295.650,00 | | | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | 541.817.500,00 | | | | 627.295.650,00 | | | |
| 3 | 25 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | 541.817.500,00 | | | | 627.295.650,00 | | | |
| 3 | 25 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | | | | | 541.817.500,00 | | | | 627.295.650,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----|----|------|------|--|--|--|--|--|---------|---------|---------|-------------------|------------------------------------|--|--|---------|-------------------|
| 3 | 25 | 04 | 2.04 | | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | | | | | | | | 541.817.500,00 | | | | | 627.295.650,00 |
| 3 | 25 | 04 | 2.04 | 0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah produksi perikanan budidaya (ton) | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 412 ton | 10 Unit | 412 Ton | 541.817.500,00 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 10 Unit | 627.295.650,00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | 25.550.172.490,00 | | | | | 21.784.717.203,00 |

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Nama Perangkat Daerah : UPT. Balai Pembibitan Ternak Pusat Kesehatan Hewan (BTPKH) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | | |
|------|----|----|--|--|---|-------------------|-----------------------|----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | |
| | | | | | | | | | | Progra m | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegi atan | | | | | | |
| | | | | | UPT BALAI PEMBIBITAN TERNAK DAN PUSAT KESEHATAN HEWAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | | | | | | | 434.399.750,00 | | | | | 468.400.000,00 | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | 434.399.750,00 | | | | | 468.400.000,00 | |
| 3 | 27 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | | | 434.399.750,00 | | | | | 468.400.000,00 | |
| 3 | 27 | 02 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | | | 408.399.750,00 | | | | | 440.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|--|--|---|--|-------|-----------|----------------|----------------|------------------------------|--|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | 00 | | | | | | |
| 3 | 27 | 02 | 2.03 | | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 408.399.750,00 | | | | | 440.000.000,00 |
| 3 | 27 | 02 | 2.03 | 0001 | Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | Peningkatan Kualitas Bibit Ternak | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % | 1 Laporan | 100 % | 408.399.750,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | 1 Laporan | 440.000.000,00 |
| 3 | 27 | 04 | | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | | | | 26.000.000,00 | | | | | 28.400.000,00 |
| 3 | 27 | 04 | 2.03 | | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 26.000.000,00 | | | | | 28.400.000,00 |
| 3 | 27 | 04 | 2.03 | 0002 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Cakupan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Peningkatan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % | 1 Laporan | 100 % | 26.000.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner | 1 Laporan | 28.400.000,00 |

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Banjarbaru Tahun 2024 yang didalamnya mencakup penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas yang disusun secara tahunan ini agar dapat dipakai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2024 merupakan acuan dan sebagai pedoman bagi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru dalam penyelenggaraan urusan tata pemerintahan pada bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan selama satu tahun, sehingga pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan dapat berjalan dengan baik dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai serta dapat dipertanggungjawabkan melalui akuntabilitas publik sesuai dengan semangat (Good Governance) untuk menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Renja ini akan terlaksana apabila mendapat perhatian semua pihak dan tersedianya anggaran. Adanya Renja ini diharapkan agar Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.